

BAB IV

KESIMPULAN

4.1. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana British Museum mempertahankan kepemilikan artefak kolonial dan menunjukkan keengganannya terhadap repatriasi melalui praktik-praktik diskursif pada periode 2022–2024. Dengan menggunakan paradigma post-positivis, pendekatan *Critical Discourse Analysis* (CDA) Norman Fairclough, serta perspektif poskolonial yang didukung oleh konsep *Authorized Heritage Discourse* (AHD) dan post-imperial nostalgia, penelitian ini menemukan bahwa keengganan British Museum terhadap repatriasi tidak semata-mata disebabkan oleh hambatan hukum atau pertimbangan pelestarian, melainkan merupakan hasil dari konstruksi wacana yang bekerja secara berlapis dan saling menguatkan.

Pada level tekstual, British Museum secara konsisten menggunakan mekanisme kebahasaan tertentu untuk membangun legitimasi kepemilikan artefak kolonial. Penggunaan pilihan leksikal seperti *stewardship*, oposisi antara *sharing* dan *giving*, penghapusan agensi kolonial melalui konstruksi pasif, penggunaan modalitas yang berbeda antara kerja sama dan kepemilikan hukum, serta metafora seperti *lending library* dan *theatre of human connection* menunjukkan adanya upaya sistematis untuk membingkai kepemilikan artefak sebagai bentuk tanggung jawab universal dan bukan sebagai hasil dari relasi kolonial yang tidak setara.

Pada level praktik wacana, penelitian ini menemukan bahwa British Museum, dewan pengurus, direktur museum, dan pemerintah Inggris membentuk suatu

koalisi diskursif yang secara konsisten mereproduksi narasi yang sama melalui berbagai jenis teks dan saluran komunikasi. Melalui mekanisme interdiskursivitas, argumentasi mengenai pelestarian, universalitas, kemitraan, dan legalitas disebarluaskan secara berulang sehingga menghasilkan kesan bahwa penolakan repatriasi merupakan konsekuensi yang netral dan tidak dapat dihindari. Dalam konteks ini, British Museum Act 1963 tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum, tetapi juga sebagai sumber legitimasi diskursif yang mengeksternalisasi tanggung jawab politik dan moral atas penolakan repatriasi.

Pada level praktik sosial, penelitian ini menunjukkan bahwa keengganan British Museum terhadap repatriasi merupakan manifestasi dari post-imperial nostalgia yang masih beroperasi dalam konteks politik dan budaya Inggris kontemporer. Nostalgia tersebut tidak muncul dalam bentuk glorifikasi imperialisme secara eksplisit, melainkan direproduksi melalui narasi universalitas, pelestarian, dan tanggung jawab global yang menempatkan Inggris sebagai penjaga warisan dunia. Pergantian kepemimpinan museum, perubahan strategi komunikasi, dan munculnya figur-figur yang lebih inklusif tidak mengubah struktur kepemilikan maupun kerangka legitimasi yang telah dibangun sejak masa imperialisme.

Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa keengganan British Museum untuk melakukan repatriasi artefak kolonial bukan sekadar persoalan hukum, administratif, maupun pelestarian budaya. Keengganan tersebut merupakan bagian dari reproduksi relasi kuasa pascakolonial yang dipertahankan melalui praktik-praktik diskursif yang dilegitimasi oleh Authorized Heritage

Discourse dan diperkuat oleh post-imperial nostalgia. Melalui mekanisme tersebut, kepemilikan artefak kolonial terus direpresentasikan sebagai bentuk pengasuhan universal dan kontribusi terhadap peradaban global, sehingga tuntutan repatriasi dapat diposisikan sebagai ancaman terhadap tatanan warisan dunia yang telah dinaturalisasi oleh institusi dan negara.

4.2. Saran

Penelitian ini berfokus pada analisis narasi klaim kepemilikan artefak sebagai alasan keengganan repatriasi artefak dengan asal usul kolonial pada British Museum. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa motivasi keengganan repatriasi oleh British Museum merupakan upaya mempertahankan sentralitas budaya dan warisan masa imperial yang telah disesuaikan dengan norma era pascakolonial. Meskipun begitu, penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan yang membuka peluang bagi kajian lebih lanjut di masa depan.

Pertama, penelitian ini berfokus pada British Museum sebagai institusi dan menggunakan perspektif *post-imperial nostalgia* untuk menjelaskan keengganannya dalam melakukan repatriasi artefak kolonial. Padahal, terdapat berbagai museum Barat lainnya yang juga menghadapi tuntutan serupa terkait kepemilikan artefak kolonial, seperti Musée du Louvre di Prancis dan Metropolitan Museum of Art di Amerika Serikat. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat memperluas cakupan kajian dengan melakukan analisis komparatif antara British Museum dan museum-museum lain yang memiliki kebijakan berbeda dalam merespons tuntutan repatriasi maupun restitusi artefak

kolonial.

Kedua, penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari artikel ilmiah, dokumen institusi, situs web resmi, serta berbagai sumber daring lainnya. Keterbatasan tersebut menyebabkan penelitian belum dapat mengkaji secara langsung praktik representasi dan kuratorial yang diterapkan oleh British Museum. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat memanfaatkan data primer melalui observasi langsung terhadap galeri, pameran, dan narasi yang ditampilkan di museum, serta melakukan wawancara dengan kurator, praktisi museum, maupun ahli warisan budaya untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai praktik pengelolaan dan representasi artefak kolonial.

Ketiga, penggunaan konsep *post-imperial nostalgia* dalam kajian Hubungan Internasional masih relatif terbatas, khususnya dalam penelitian yang berfokus pada institusi budaya dan isu repatriasi artefak kolonial. Padahal, konsep ini memiliki potensi untuk digunakan dalam menganalisis berbagai bentuk sikap dan kebijakan negara modern dalam mempertahankan warisan kolonialnya. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat mengembangkan penggunaan konsep *post-imperial nostalgia* pada isu-isu lain dalam Hubungan Internasional, seperti diplomasi budaya, politik memori, kebijakan luar negeri negara bekas imperium, maupun dinamika dekolonisasi dalam institusi internasional.